

ABSTRAK

FAISAL I SANGAJI. 820221035. Perlindungan Hukum Masyarakat Terkait Pemindahan Tiang Listrik Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagalistrikan, dibimbing oleh Rusdin Alaudin dan Nam Rumkel

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemindahan tiang listrik serta pemberian kompensasi terhadap hak masyarakat yang terdampak atas pendirian tiang listrik, serta meninjau bagaimana peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) metode ini merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur ataupun langkah-langkah yang harus diambil dalam satu penelitian secara sistematis dan logis.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat terkait pendirian dan pemindahan tiang listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Kota Ternate. Penyediaan tiang listrik untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat bukan sebaliknya justru memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) UP3 Ternate, sehingga perlu melakukan pendekatan dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak masyarakat di kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Ketenagalistrikan telah menyediakan dasar hukum yang cukup bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang terdampak oleh pendirian tiang listrik, berhak mendapatkan kompensasi terhadap penggunaan lahan oleh PT. PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kata kunci: Ketenagalistrikan; Ganti Rugi; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

FAISAL I SANGAJI. 820221035. *Community Legal Protection Related to Electricity Pole Removal in Perspective of Electricity Law, supervised by Rusdin Alaudin and Nam Rumkel*

This research aims to analyze the laws and regulations related to the removal of electricity poles and the provision of compensation for the rights of communities affected by the erection of electricity poles, as well as to see how these regulations provide legal protection for affected communities.

This research method uses empirical legal research (empirical legal research) this method is a study that presents how or procedures or steps that must be taken in a study systematically and logically.

The results of this study aim to bring justice to the community regarding the establishment and removal of electricity poles carried out by PT PLN (Persero) Ternate City. The provision of electricity poles is for the welfare of the people and the prosperity of the people, not the other way around, which has a detrimental impact on the community. This research was conducted at PT PLN (Persero) UP3 Ternate, so it is necessary to approach using preventive legal protection by involving or involving affected communities in determining the point and ensuring that the construction is in accordance with safety and safety distances. It is also obligatory to conduct supervision from the government on the establishment of electricity networks which is part of preventive legal protection of community rights in Fitu Village, South Ternate City, in accordance with the provisions contained in the Electricity Law Article 30 paragraphs 1 and 2 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity.

Electricity Act has provided sufficient legal basis for the community, so that the community affected by the establishment of electricity poles, is entitled to compensation for land occupation by PT PLN (Persero) in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Electricity; Compensation;; Legal Protection

